

SOSIALISASI PENGELOLAAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS DIGITAL DI DESA SUMERTA KELOD, KOTA DENPASAR

I Putu Adi Permana Putra¹⁾, I Gusti Ayu Agung Yuliartika Dewi²⁾, I Gede Agus Wibawa³⁾
^{1,2,3} Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Email penulis: diegho.permana@gmail.com, agungyuli14@gmail.com, benkland@yahoo.com

Abstract

The results of field observations carried out at the service locus objectively found that the problems being faced by Sumerta Kelod Village, Denpasar City, regarding digital-based village government administration. This was explained by village officials that since the 2020 COVID-19 pandemic, village administration data has not been organized and visible on the website, so efforts or steps are needed to realize digitally integrated village government administration management. Based on these issues, efforts and steps need to be taken, starting with the socialization and development of village government administration. This community service activity is carried out by a team of public administration major, with a focus on developing village administration. The objectives of this socialization and coaching are: 1) providing education and understanding to village officials regarding digital-based village administration management; 2) optimizing the use of technology in providing public services to the community; and 3) realizing good governance in digital-based village government.

Keywords: Management, Villages Government of Administration, Digitalization

Abstrak

Hasil obeservasi lapangan yang telah dilakukan pada lokus pengabdian secara objektif ditemukan bahwa permasalahan yang tengah dihadapi oleh Desa Sumerta Kelod, Kota Denpasar mengenai tata kelola administrasi Pemerintahan Desa berbasis digital. Hal in dijelaskan oleh perbekel desa bahwa sejak pandemi covid-19 tahun 2020 data administrasi desa belum tertata dan tampak pada website desa sehingga dibutuhkan upaya atau langkah dalam mewujudkan pengelolaan administrai pemerintahan desa yang terintegrasi secara digital. Berdasarkan isu tersebut, dibutuhkan upaya dan langkah yang perlu dilakukan dengan diawali melalui sosialisasi dan pembinaan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim pengabdian dari Program Studi Ilmu Administrasi Publik, dengan fokus pada pembinaan administrasi desa. Tujuan dari sosialisasi dan pembinaan ini ialah 1) Memberikan edukasi dan pemahaman kepada aparatur desa mengenai tata kelola administrasi desa berbasis digital; 2) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3) Mewujudkan good governance pemerintahan desa berbasis digital.

Kata kunci: Pengelolaan, Administrasi Pemerintahan Desa, Digitalisasi

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi salah satu kunci mencapai pembangunan nasional yang optimal. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa [1] bahwa aparatur desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan desa dan pengelolaannya di tingkat lokal yang di dalamnya juga termasuk menjalankan administrasi desa secara tertib. Sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa [2], bahwa administrasi pemerintahan desa menjadi sebuah keseluruhan proses dalam hal pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa baik berupa administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.

Dewasa ini di era revolusi industri 4.0, teknologi berkembang sangat pesat dan menawarkan berbagai kemudahan dalam berbagai sektor maupun lini kehidupan. Hal ini juga memberikan peluang dalam mempermudah tata kelola administrasi termasuk administrasi pemerintahan. Teknologi digital untuk menunjang peningkatan kinerja serta kesejahteraan, menghemat biaya dan konsumsi sumber daya, serta untuk terlibat lebih efektif dan aktif dengan warganya [3]. Era ini memberikan mandat kepada para aparatur pemerintahan untuk dapat mengaktualisasikan proses pengelolaan berbagai komponen dalam pemerintahan melalui teknologi, termasuk pengelolaan administrasi di Desa. Menurut [4] dalam artikelnya menjelaskan bahwa praktik pengelolaan administrasi desa masih perlu upaya pembinaan, hal ini didukung oleh beberapa sumber dari hasil penelitian yang dikutip mengenai pengelolaan administrasi desa yang masih belum tertib dan tidak ditemukan catatan data dan informasi administrasi desa [4].

Penjelasan temuan di atas menjadi cerminan akan temuan yang diperoleh di lapangan, bahwasannya berbagai data administrasi Desa Sumerta Kelod belum tampak dalam website. Hal ini menjadi menarik, mengingat bahwa desa ini berada di tengah pusat Kota Denpasar. Berdasarkan

hasil wawancara dan observasi awal bersama perbekel Desa Sumerta Kelod, disampaikan bahwasanya hal ini sedang menjadi perhatian khusus perbekel desa dalam meningkatkan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Apalagi saat awal pandemi berbagai data antara pusat dan data yang dimiliki oleh desa tidak sinkron, padahal sumber data tersebut berada di Desa.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa perlunya upaya dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola administrasi pemerintahan desa, mengingat bahwa administrasi pemerintah di desa sangatlah penting dan memiliki keterkaitan dalam mencapai pembangunan. Urgensi tata kelola administrasi pemerintahan desa perlu mendapat perhatian khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital. E-government diperlukan untuk dapat membantu transformasi negara menuju era masyarakat informasi dan keterbukaan data [6]. Hal ini nantinya akan memberikan kemudahan pelayanan dan kebutuhan publik. Menilik realitas yang dihadapi oleh Desa Sumerta Kelod maka solusi yang dapat diberikan ialah terkait upaya pembinaan tata kelola administrasi pemerintahan desa bagi aparatur desa. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan administrasi desa bukan lagi diakibatkan oleh kualitas sumber daya manusia sehingga perlu penguatan kompetensi dan kemampuan aparatur desa dalam tata kelola yang berbasis digital. Tata kelola administrasi pemerintahan desa berbasis digital memberikan kemudahan publik dalam mengakses berbagai informasi dan pelayanan desa. Hal ini juga menjadi output dari pelaksanaan pembangunan desa sebagai wujud pembangunan administrasi.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada mitra yaitu Desa Sumerta Kelod, permasalahan yang dihadapi di desa sejak pandemi covid-19 di tahun 2020 bahwa data administrasi desa belum tertata dengan baik dan belum terintegrasi secara digital. Sehingga data-data administrasi di Pemerintahan Desa Sumerta Kelod belum tampak dalam website desa.

Realita ini mengharapkan sebuah solusi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan administrasi pemerintahan desa. Maka dari itu perbekel Desa Sumerta Kelod mengharapkan agar dapat dilakukan pengabdian berupa pembinaan maupun metode lainnya yang dapat membantu dalam menata administrasi desa yang berbasis digitalisasi.

Pengabdian Kepada Masyarakat ini, terfokus dalam memberikan sosialisasi sebagai langkah awal dalam melakukan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Berbasis Digital di Desa Sumerta Kelod, Kota Denpasar. Target yang ingin diperoleh dalam pengabdian ini yaitu mengenai pemahaman aparatur desa akan pentingnya pengelolaan administrasi desa yang terintegrasi secara digital, sehingga hal ini dapat menunjang dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

3. METODELOGI PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dirancang selama periode 5 bulan melalui pendekatan interaktif dengan berbagai tahapan yang dilaksanakan, diantaranya:

1. Mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan permasalahan yang difokuskan untuk diselesaikan. Metode pendekatan dilakukan melalui observasi permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Aparatur Desa Sumerta Kelod. Hal ini diawali dengan dilakukannya wawancara bersama perbekel desa terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga prosedur kerja yang dilakukan dapat menyesuaikan. Hasil wawancara yang disampaikan kemudian dicatat dan disesuaikan melalui koordinasi dan komunikasi dalam menentukan tahap berikutnya yang hendak dilakukan.
2. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang diperoleh dengan pendekatan yang dipilih, menghasilkan fokus langkah yang hendak dilakukan dalam pengabdian ini. Hal yang hendak dilakukan ialah, memberikan edukasi melalui sosialisasi. Edukasi yang diberikan berkaitan dengan tata kelola administrasi pemerintahan desa. Dalam hal ini edukasi yang diberikan mengenai

dasar administrasi pemerintahan desa, serta pentingnya administrasi desa berbasis digital di era ini. Pada kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antar tim pengabdian dengan masyarakat ataupun aparatur desa

3. Melakukan pembinaan kepada aparatur desa dalam mengelola administrasi desa berbasis digital. Kegiatan ini dilakukan sebagai lanjutan kegiatan sosialisasi kepada aparatur desa dan masyarakat dengan dibekali pengetahuan akan pentingnya digitalisasi serta memberikan pembinaan penataan data administrasi pada website desa sebagai bentuk implementasi program.

Pelaksanaan Sosialisasi dan pembinaan dalam Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juli 2023. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Desa Sumerta Kelod, Kota Denpasar.

Sasaran utama pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para aparatur Desa Sumerta Kelod dalam melakukan penataan dan pengelolaan Administrasi Desa dalam hal memberikan pelayanan publik melalui pemanfaatan media atau digital. Selain itu, masyarakat setempat juga menjadi sasaran dalam pengabdian ini, dengan tujuan memberikan edukasi dalam memperoleh pelayanan publik ditingkat desa secara digital.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Observasi Awal

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diawali dengan observasi, yang dilaksanakan oleh tim pengabdian. Pelaksanaan observasi dilakukan melalui pengumpulan data secara sekunder maupun primer dalam melihat situasi dan kondisi yang tengah dihadapi pada lokus pengabdian. Kegiatan observasi menjadi langkah awal yang perlu dilakukan oleh pengabdian dengan tujuan agar menemukan permasalahan secara objektif yang perlu diselesaikan. Observasi juga menjadi langkah dalam menentukan tindakan lanjut atau upaya yang tepat dalam mempercepat penyelesaian permasalahan yang ditemukan di lapangan.



Gambar 1. Koordinasi dengan Perbekel Desa Sumerta Kelod

Sosialisasi dan Pembinaan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian materi mengenai Administrasi Pemerintahan di Desa serta pentingnya pemanfaatan digital. Pemateri menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang pesat ini merupakan wujud dari perkembangan zaman serta desakan peradaban. Administrasi pemerintahan desa sejatinya telah memiliki regulasi yang dapat digunakan sebagai pijakan dalam tata kelola administrasi di pemerintahan desa yaitu melalui Permendagri 47 tahun 2016, dimana telah tertuang bahwa ruang lingkup administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi penduduk, administrasi Pembangunan, dan administrasi lainnya diharapkan semuanya dapat terintegrasi secara digitalisasi.

Perlu dipastikan bahawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan administrasi desa juga perlu digitalisasi baik melalui sistem atau aplikasi, yang mana nantinya dapat masuk kepada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini semua muaranya ada pada Perpres 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Jadi satu data desa harus masuk ke satu data kecamatan, lalu satu data kecamatan masuk dalam satu data kabupaten, dan nantinya data-data ini masuk ke dalam satu data provinsi hingga akhirnya keseluruhan akan masuk dalam satu data Indonesia.



Gambar 2. Tahap sosialisasi dan pendampingan tim pengabdian

Setelah mendapatkan pemahaman materi dan edukasi mengenai administrasi pemerintahan di desa berbasis digital. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan peserta pengabdian. Dalam hal pemateri menggambarkan bahwa praktek di lapangan dalam mewujudkan tata kelola administrasi desa yang berbasis digital masih cukup sulit ditempuh, melihat fenomena yang terjadi dan sistem koordinasi. Kalau membahas mengenai *e-governance* sesungguhnya data-data yang ada dalam instansi haruslah terintegrasi dan tidak terpisah-pisah oleh aplikasi, sehingga maksud dari *e-governance* itu membuat adanya integrasi data dalam satu sistem.

Kegiatan berikutnya mengenai pembinaan dalam administrasi pemerintahan desa. Pada hal ini, digambarkan dan dijelaskan terkait dengan data-data apa saja yang perlu diintegrasikan secara digital. Selain itu peserta pengabdian, khususnya aparatur pemerintahan desa didampingi terkait dengan tata kelola administrasi dalam website desa. Sehingga hal ini nantinya akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik serta mewujudkan *good governance* di era digital.

5. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan administrasi pemerintahan desa diikuti oleh aparatur pemerintahan Desa Sumerta Kelod, masyarakat setempat, serta kelompok mahasiswa KKN pada desa tersebut. Peserta pengabdian kepada masyarakat memberikan antusias yang tinggi dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan menerima materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Aparatur desa, dan masyarakat, memberikan respon yang positif serta aktif dalam kegiatan diskusi yang berlangsung.

Dari hasil sosialisasi dan pembinaan administrasi desa bahwa, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi langkah awal yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan di desa, khususnya terkait dengan digitalisasi. Kegiatan ini sebagai langkah awal dalam mengoptimalkan pemahaman aparatur desa dalam melakukan tata kelola administrasi pemerintahan desa berbasis digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparatur desa mulai dapat mempersiapkan data-data administrasi yang perlu diintegrasikan secara digital. Selain itu, pembinaan dalam administrasi pemerintahan desa diharapkan nantinya dapat mendukung desa dalam memberikan pelayanan optimal kepada publik serta mewujudkan *good governance* di era digital.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah bersedia memberikan dukungan finansial secara penuh khususnya pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Warmadewa, sehingga pengabdian ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Kepada Desa Sumerta

Kelod, Kota Denpasar yang telah membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

7. REFERENSI

- [1] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- [2] Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- [3] A. Nurrahman, M. Dimas, M. F. Ma'sum, and M. F. Ino, "Pemanfaatan Website Sebagai Bentuk Digitalisasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Garut," *J. Teknol. dan Komun. Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, pp. 78–95, 2021, doi: 10.33701/jtkp.v3i1.2126.
- [4] M. Fanzikri, "Pendampingan Pemerintahan Gampong Dalam Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Desa (Best Practice Di Gampong Teungoh Baro)," *J. Al-Ijtima'iyyah*, vol. 8, no. 2, p. 320, 2022, doi: 10.22373/al-ijtima'iyyah.v8i2.15622.
- [5] N. Rachmatullah and F. Purwani, "Analisis Pentingnya Digitalisasi & Infrastruktur Teknologi Informasi Dalam Institusi Pemerintahan: E-Government," *J. Fasilkom*, vol. 12, no. 1, pp. 14–19, 2022, doi: 10.37859/jf.v12i1.3512.
- [6] Jaya, Indera. "PENGEMBANGAN INOVASI PEMASARAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI DESA GAYA BARU LAMPUNG TENGAH MENGGUNAKAN E-COMMERCE." *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1.8 (2022): 1693-1698.